

ABSTRAK

Kinerja Pemerintah Daerah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian hasil pelaksanaan suatu kegiatan atau program Pemerintah Daerah dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi Daerah. Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah dinilai dengan menggunakan skor kinerja yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam Laporan Pemingkatan Pemerintah Daerah (LPPD) dalam satu tahun berjalan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah yang terdiri atas Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat, dan Ukuran Pemerintah Daerah serta variabel lain yakni Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2012-2015. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari *website* resmi BPK RI, DPJK Kementerian Keuangan RI, dan Kementerian Dalam Negeri RI selama tahun 2012 sampai tahun 2015.

Penelitian ini menggunakan *purposive sampling* sebagai sampel penelitian serta populasi yang dituju yakni Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Selatan dengan tahun penelitian 2012-2015. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dan menggunakan *software Eviews 10 version*.

Menurut hasil pengujian yang telah dilakukan, secara simultan Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat, Ukuran Pemerintah Daerah, dan Temuan Audit BPK memiliki pengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Sedangkan secara parsial, variabel Tingkat Kekayaan Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, dan Temuan Audit BPK tidak memiliki pengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Berbeda dengan variabel Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat yang memiliki pengaruh negatif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Untuk pengembangan penelitian, disarankan agar peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel di dalam penelitian ini dan menambah tahun penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan bagi Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Selatan dapat memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah-nya untuk menambah Tingkat Kekayaan Daerahnya serta pengawasan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) masing-masing agar meminimalisir Temuan Audit BPK.

Kata Kunci: Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat, Ukuran Pemerintah Daerah, dan Temuan Audit BPK

